

Peranan departemen luar negeri dalam penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia, 1963-1964

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20272236&lokasi=lokal>

Abstrak

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia sering terjadi pada tahun 60-an cukup menarik perhatian dunia. Konflik yang terjadi karena penolakan Indonesia terhadap berdirinya satu negara baru di kawasan Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara yang disebut dengan Malaya, Alasan penolakan ini adalah adanya anggapan Indonesia bahwa negara baru ini didirikan hanya untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara.

Dalam perkembangannya kemudian, telah ditempuh upaya penyelesaian berupa perundingan-perundingan antara kedua negara. Upaya ini gagal karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan konfrontasi makin meruncing dengan diproklamasikannya Malaysia pada bulan September 1963. Usaha perdamaian yang dilakukan setelah itu juga mengalami kegagalan. Dapat dikatakan bahwa setelah KTT Tokyo 1964, tidak ada lagi usaha menuju perdamaian secara resmi.

Sementara itu dari dalam negeri muncul pihak-pihak yang menginginkan konfrontasi tetap dilanjutkan. Dari pihak Indonesia, inisiatif diambil oleh pihak TNI-AD. Mereka berhasil mengadakan kontak dengan kelompok tertentu di Malaysia yang juga tidak menginginkan konfrontasi tetap dilanjutkan. Tetapi konfrontasi akan dapat diselesaikan' yang diinginkan umma-uaaha yang dilakukan TNI-AD. Penyelesaian itu membolehkan sesuai yang dilakukan membuat kelihatan 'legal' di mata hukum internasional. Pada tahap inilah pihak- departemen luar negeri (Deplu) di butuhkan. Deplu dan militer bekerjasama dengan konfrontasi dapat diselesaikan. Pihak militer membutuhkan Deplu sebagai wakil resmi pemerintah yang menangani urusan luar negeri dan sebaliknya Deplu membutuhkan pihak militer karena mereka lebih mengetahui situasi. '